

**STRATEGI MENINGKATKAN PARTISIPASI WARGA
DALAM PENERTIBAN PKL
(Studi Kasus strategi Komunikasi Politik Walikota Bandung Ridwan Kamil untuk
Membangun Partisipasi Warga dalam Penertiban PKL Di Jalan Kepatihan Bandung)**

Achmad Abdul Basith
Abie Besman

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
Jatinangor, Sumedang – Jawa Barat
Email: basithpatria@gmail.com

ABSTRAK

Rendahnya partisipasi warga, baik Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri, maupun warga masyarakat umum dalam mendukung program ketertiban pemerintah Kota Bandung, membuat Walikota Bandung Ridwan Kamil memutar otak. Pada awal pemerintahannya Ridwan Kamil mengeluarkan strategi-strategi baru dalam menertibkan pedagang kaki lima, yang pada masa pemimpin sebelumnya selalu gagal ditertibkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi politik Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk meningkatkan partisipasi warga dalam menertibkan PKL di Jalan Kepatihan Bandung, khususnya soal rendahnya kesadaran warga yang selama ini menjadi salah satu penyebab selalu gagalnya penertiban. Metode yang digunakan dari penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Walikota Bandung Ridwan Kamil, Kepala Satpol PP Kota Bandung Ferdi Ligaswara, Koordinator PKL Kepatihan Muhammad Taufik, dan beberapa perwakilan masyarakat Kota Bandung.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik yang dilakukan Walikota Bandung Ridwan Kamil, mampu meningkatkan kesadaran warga, sehingga upaya penertiban yang dilakukan berjalan lancar dan kondusif tanpa menimbulkan banyak perlawanan dan bentrokan. Ridwan Kamil menggunakan empat tahapan penertiban yaitu *ngobrol*, mencari solusi, eksekusi, dan *beautifikasi*.

Kata Kunci: *Ridwan Kamil, Partisipasi Warga, Kesadaran Warga, Pedagang Kaki Lima, Kota Bandung*

PENDAHULUAN

Kota besar memiliki permasalahan yang hampir serupa. Namun dalam penyelesaiannya memerlukan strategi dan pendekatan yang berbeda. Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) misalnya, Bandung memiliki keunikan tersendiri. Maka dalam penanganannya, Walikota Bandung Ridwan Kamil menerapkan beberapa strategi khusus, terutama dalam membangun kesadaran warganya, baik PKL sendiri maupun warga masyarakat umum.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jl. Kepatihan sudah lama dikeluhkan. Namun hal tersebut hingga pertengahan tahun 2013 tak lekas mampu diselesaikan oleh pemerintah terkait. Alasan warga mengeluhkan keberadaan PKL karena menjadi penyebab kemacetan, jalan jadi kumuh dan semrawut.

Pemerintah sebelumnya sebenarnya tak tinggal diam. Berbagai upaya pernah dilakukan, mulai dari penertiban paksa, relokasi, hingga pemberian kompensasi bagi PKL untuk kembali ke kampung halamannya. Namun upaya tersebut tak membuahkan hasil maksimal. Setidaknya hingga akhir 2013 PKL masih memenuhi Jalan Kepatihan, jalan yang menjadi penghubung antara jalan Oto Iskandardinata (Otitsta) dan Jalan Dewi Sartika.

Lokasi jalan yang berada tak jauh dari Rumah Dinas Walikota Bandung membuat kawasan ini jadi sorotan. Mana mungkin pemimpin Bandung tak melihat ketidaktertiban yang ada di sekitar rumahnya. Sehingga masyarakat menaruh curiga akan komitmen pemerintah Kota Bandung terhadap upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung no. 11 Tahun 2005 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan (K3) dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.

Permasalahan PKL di Kota Bandung memang cukup kompleks. Selain permasalahan pada internal pemerintah daerah sebagai penerbit dan penegak peraturan daerah (perda), nyatanya keterlibatan warga dalam menangani masalah di kotanya masih sangat minim. Kebanyakan lebih bergantung pada pemerintah dan memilih untuk lepas tangan. Hal ini yang tengah dengan keras oleh Walikota Bandung pikirkan. Karena menurutnya, menangani masalah kota tidak cukup oleh pemerintah, namun harus melibatkan masyarakat. Ridwan Kamil menyebutnya “kolaborasi”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus. Studi kasus sendiri adalah metode riset yang menggunakan berbagai sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis. Penelaah berbagai sumber data ini membutuhkan berbagai macam instrument pengumpulan data. Metode penelitian ini bisa menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipan, dokumentasi-dokumentasi, kuisisioner, bukti-bukti fisik, dan lainnya (Kriyantono, 2006).

Ditulis oleh Prof Deddy Mulyana dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif, memasukan semua penelitian naturalistik ke dalam paradigma interpretif, varian-varianya mencakup teori dan prosedur yang dikenal sebagai etnografi, fenomenologi, etnometodologi, interaksionisme simbolik, psikologi lingkungan, analisis semiotika, dan studi kasus. Studi

kasus adalah suatu eksplorasi dari sebuah sistem terbatas atau suatu kasus secara mendetail, pengumpulan data secara mendalam dari informasi-informasi (Creswell, 1998: 61).

Sebagai suatu metode kualitatif, studi kasus mempunyai beberapa keuntungan. Lincoln dan Guba (Mulyana, 2001:201) mengemukakan bahwa keistimewaan studi kasus meliputi hal-hal berikut:

1. Studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian emik, yakni menyajikan pandangan subjek yang diteliti.
2. Studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari.
3. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden.
4. Studi kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual tetapi juga keterpercayaan (trust worthiness).
5. Studi kasus memberikan "uraian tebal" yang diperlukan bagi penilaian atas transferabilitas.
6. Studi kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut.

Penelitian ini dilakukan di:

- 1.. Rumah Dinas Walikota Bandung, Jalan Dalem Kaum no 1 Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Kota Bandung.
- 2.. Studio Radio PRFM, di Jalan Braga 5 Bandung, yang setiap senin Walikota Rutin bersiaran mendengarkan aspirasi warga melalui program "Ngabandungan"
- 3.. Kantor Walikota Bandung, Jalan Wastukencana no 2 Bandung
- 4.. Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, Jalan Aceh no 47 Bandung
- 5.. Eliza Bakery Jalan Kepatihan no 21 Bandung.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah: teknik utama menggunakan *indepth interview*, sebagai pendukung digunakan observasi dan analisis dokumen. Untuk memperoleh pemahaman dan makna mendalam tentang Komunikasi Walikota Bandung dalam penertiban PKL Jalan Kepatihan, peneliti memerlukan data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah dokumentasi proses penertiban yang dilakukan oleh Walikota Bandung mulai dari tahap pertama, hingga eksekusi.

Selanjutnya peneliti juga membutuhkan sumber data lain yang merupakan persepsi dan pandangan dari orang-orang yang terlibat dalam proses Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Kepatihan Bandung. Selain itu, peneliti juga meminta pandangan umum dari masyarakat.

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam kepada informan untuk mendapatkan data-data primer. Wawancara dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan tidak terstruktur untuk mendapatkan kedalaman data yang diinginkan.

Selain data primer, peneliti juga membutuhkan data sekunder, yang merupakan data pendukung. Data sekunder diperoleh dari luar data primer. Untuk menentukan data sekunder dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, observasi dan studi pustaka yang

berkaitan dengan proses Penertiban PKL di Kawasan Jalan Kepatihan Bandung, khususnya soal integritas petugas Sat Pol PP.

Observasi yang dilakukan adalah dengan mengamati kondisi saat ini kawasan Jalan Kepatihan, dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya, berdasarkan pengalaman pribadi peneliti.

Data-data sekunder lainnya diperoleh dengan studi pustaka terhadap dokumentasi yang pernah diabadikan oleh tim humas Pemerintah Kota Bandung atau para wartawan.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan gambar statistik. (Lofland dalam Moleong, 2005:157).

Sumber data adalah salah satu hal yang paling vital dalam penelitian. Terdapat dua jenis data yang biasanya dilakukan dalam penelitian sosial, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data primer akan menggunakan wawancara dengan Walikota Bandung Ridwan Kamil, Kepala Satpol PP Kota Bandung Ferdy Ligaswara, Koordinator Pedagang Kaki Lima-PKL dan Muhammad Taufik, serta beberapa narasumber yang dipilih secara acak. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan-laporan, internet, surat kabar, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rendahnya Kesadaran PKL terhadap Aturan

Kesadaran masih menjadi masalah utama dari permasalahan ketertiban di Kota Bandung. Aturan sudah lama dibuat, sudah berbagai cara sosialisasi dan penegakan dilakukan, tetapi pelanggaran masih saja terjadi. Kesadaran akan tertib aturan harusnya jadi prinsip setiap warga kota, tak terkecuali Pedagang Kaki Lima.

Dengan alasan perut dan susahny mencari kerja di sektor formal membuat sebagian warga memilih untuk berjualan di area terlarang. Soal dampaknya yang membuat lalulintas terganggu, wajah kota semrawut, mereka tak peduli.

Wawancara dengan Koorinator PKL Kepatihan Muhammad Taufik menjelaskan jika sejatinya mereka mengetahui soal aturan, meski ia juga mengakui hal tersebut tidak sepenuhnya dipahami oleh anggotanya, PKL di Jalan Kepatihan.

Muhammad Taufik juga menjelaskan jika secara rinci anggotanya tidak semua mengetahui Perda K3, hanya saja mereka paham bahwa di lokasi tersebut dilarang untuk berjualan.

“Ya kami tahu di sini tidak boleh jualan menurut aturan. Tapi kalau tidak di sini kami mau hidup dari mana,” kata Koordinator PKL Kepatihan, Muhammad Taufik.

Opik, panggilan Muhammad Taufik, mengakui jika keberadaan Perda K3 sejak tahun 2005 sudah ia ketahui bersama dengan PKL yang ada di Kepatihan. Opik bahkan malah balik mengkritik kepada pemerintah sebelumnya yang tidak mampu mengkomunikasikan tentang implementasi Perda K3 tersebut kepada pihak PKL Kepatihan sehingga programnya gagal terlaksana.

Jika aturan sudah ada tapi tidak dijalankan dengan baik, Opik menyampaikan jika hal tersebut bergantung pada pemimpin masing-masing. Karena setiap pemimpin memiliki gaya yang berbeda. Ridwan Kamil dianggap bisa melaksanakan peraturan ini, hanya saja masih tebang pilih. Ridwan Kamil dianggap hanya berani menertibkan PKL di Kapatihan. Sementara di lokasi lain masih terkesan di diamkan.

“Kalau dari dulu sebelum Pak Dada juga udah ada aturan Perda tuh. Hanya, seorang pemimpin yang ngerti kebijakan, ada yang mau menjalankan dan tidak. Tahun 2005 itu sudah keluar Perda K3 Nomor 11. Kenapa tidak bisa dilaksanakan? Nah, letaknya pada pemimpin yang mau menjalankan. Ini diteruskan kepada Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil emang menerapkan hal itu, tapi tidak bisa secara keseluruhan. Tapi secara bertahap. Bisa diterapkan, asal melibatkan jajaran Muspika & Muspida. Tidak bisa seorangan,” Kata Muhamad Taufik.¹

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ferdy Ligaswara mengaku jika beberapa kali pihaknya melakukan upaya komunikasi sebelum melakukan penegakan perda. Kadang imbauan itu disampaikan melalui surat, kadang penindakan di lapangan secara langsung meski harus “kucing-kucingan”. Ferdy meyakini jika sejatinya PKL semua sudah mengerti jika di lokasi Jl. Kapatihan tidak diperbolehkan berdagang, namun dengan berbagai alasan mereka masih membandel. Sehingga Ferdy berkesimpulan jika permasalahan PKL di Jalan Kapatihan salah satunya disebabkan oleh rendahnya kesadaran PKL terhadap aturan.

Lemahnya kesadaran terhadap aturan juga diakui oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil. Bahkan Ridwan Kamil menemukan jika yang berjualan di Jalan Kapatihan bukan sepenuhnya PKL murni. Bahkan sebagian besar pedagang-pedagang besar yang sengaja membuka lapak demi menghindari pajak. Padahal mereka juga sudah mengetahui di lokasi tersebut bukanlah tempat berdagang, dan sudah ada aturan tegas yang diterapkan.

Menurut Walikota Bandung ada beberapa karakteristik pedagang di Jalan Kapatihan Bandung, yaitu:

- a. PKL Murni, yaitu mereka menggantungkan hidupnya dari berjualan dan jika tidak berjualan kebutuhan ekonomi mereka akan terganggu. Mereka biasanya berjualan dengan berpindah-pindah.
- b. PKL Yang Menjadi Kapanjangan Bisnis Pemilik Toko. PKL jenis ini merupakan pemilik toko atau karyawan-karyawan yang dipekerjakan oleh pemilik toko-toko besar untuk ikut mendongkrak penjualan dengan memasarkan barang dagangan di lokasi kaki lima. Selain memiliki kios/toko mereka juga berjualan di berbagai pusat keramaian. Mereka melakukan hal tersebut selain untuk meraih keuntungan berlipat juga untuk menghindari pajak.
- c. PKL Yang Dipekerjakan Oleh Bandar. PKL jenis ini bekerja dan diberikan modal serta barang-barang dagangan oleh seorang bandar atau yang memberikan modal. Sehingga mereka bertugas untuk memasarkan barang dagangan. Kemudian hasil dari penjualan barang dagangan tersebut, mereka menyerahkan setoran kepada bandar. Para PKL ini juga mendapatkan bagian dari keuntungan atau gaji tetap layaknya seorang karyawan.

¹ Wawancara dengan Koordinator PKL Kapatihan Muhamad Taufik, Selasa 3 Maret 2015, pukul 08.30 WIB. di Eliza Bakery Jalan Kapatihan no 21 Bandung.

- d. PKL Keliling Milik Orang Kaya. Sering kita melihat mobil-mobil bagus yang ternyata digunakan untuk berjualan. Mulai dari jualan baju, buku, makanan, hingga buah-buahan. Mereka adalah orang yang mampu bahkan kaya. Namun melakukan aktivitas layaknya PKL untuk mengejar keuntungan berlipat tanpa harus mengeluarkan pajak.

Beragam jenis PKL yang diidentifikasi langsung oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil adalah salah satu bukti bahwa PKL memiliki latarbelakang yang beragam. Tak sedikit diantaranya adalah dari kalangan terdidik, yang mengerti dan paham terhadap aturan namun bersikeras melanggarnya. Walikota Bandung Ridwan Kamil menyebutnya sebagai *street economy*.

“Saya baru tahu kalau ternyata banyak yang sebenarnya tidak layak jadi PKL. PKL karakternya itu berpindah-pindah, dan jika tidak berdagang hajat dia terganggu. Saya punya istilah *street economy*. Jadi ada yang memang PKL, pemilik toko buka lapak, ada bandar PKL, ada yang kaya turun sendiri dengan mobil sendiri. Mereka menghindari pajak,” kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.²

Bahkan temuan dari Walikota Bandung Ridwan Kamil, bahwa Koordinator PKL Kepatihan Muhammad Taufik yang selama ini sering protes terhadap upaya penertiban PKL di Jl. Kepatihan ternyata adalah pemilik kios di sentra usaha yang ada di jalan Kepatihan. Dia juga ketahuan berjualan juga di pasar minggu Gasibu serta Tegalega. Maka menurut Ridwan Kamil, Opik adalah salah satu pengusaha yang selayaknya mampu menyewa kios di pasar baru atau lokasi yang lain.

“Jadi yang di jalan tidak bisa dipukul rata. Coba cek, Opik. Opik itu punya kios di mana-mana. Dia pebisnis, masuk pengusaha. Harusnya bisa nyewa di pasar baru,” kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Sehingga dengan latar belakang PKL yang berbeda-beda tersebut, Opik-yang selama ini dikenal gencar menyuarakan nasib PKL yang tidak bersedia untuk dipindahkan ke kawasan Gedebage, ternyata juga memiliki motif atau kepentingan tersendiri dari kegiatan berjualannya tersebut, yakni untuk mencari keuntungan dengan cara menghindari pajak.

Masalah kesadaran dalam menati aturan ternyata tidak hanya menjadi masalah bagi PKL, tetapi juga warga masyarakat umum. Teori *Supply and demand* juga berlaku. Semakin banyak permintaan (pembeli), maka jumlah pedagang pun akan semakin bertambah. Padahal aturan untuk tidak membeli pada pedagang kaki lima juga sudah ada, bahkan ada ancaman denda bagi yang melanggarnya.

Strategi Atasi Permasalahan Rendahnya Kesadaran PKL Terhadap Aturan

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil bekerja keras memutar otak mencari solusi rendahnya kesadaran warganya dalam turut menjaga ketertiban kota. Sebelum melangkah ke masalah PKL yang melibatkan ratusan orang, sekilas kita tengok permasalahan sampah yang melibatkan ribuan bahkan jutaan orang di Kota Bandung belum mampu teratasi. Jika

² Wawancara dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Minggu 17 Mei 2015, pukul 22.00 WIB, di Pendopo Kota Bandung Jalan Dalem Kaum no 1 Bandung.

alasanya fasilitas tempat sampah, harusnya masalah ini sudah selesai jauh-jauh hari saat pemerintah menyediakan fasilitas itu. Tapi nyatanya tidak.

Hal yang hampir sama juga terjadi pada masalah PKL. Saat aturan sudah ada, dan berbagai berbagai cara dilakukan untuk menyampaikannya kepada PKL maupun masyarakat sudah ditempuh. Maka pertanyaan besar mengarah pada kesadaran pribadi masyarakat Bandung akan ketertiban kotanya.

Walikota Bandung Ridwan Kamil akhirnya memilih berinovasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi sejak lama di Bandung. Menurutnya jika menggunakan cara-cara lama kadang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Maka mengubah pendekatan menjadi pilihan.

“Kita berinovasi dengan improvisasi. Jadi menyelesaikan kepentingan tidak sama, nah ini masih bermasalah,” kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil

Membangun kesadaran warga Bandung dan PKL dimulai dengan penyampaian informasi berupa aturan yang tertuang dalam perda maupun berupa kebijakan langsung walikota. Ridwan Kamil melakukannya melalui media massa. Pertama, Ridwan Kamil memanfaatkan siaran radio sebagai salah satu upayanya. Seminggu sekali Ridwan hadir sebagai narasumber utama untuk mendengarkan aspirasi warga melalui siaran radio PRFM 107.5. Dalam kesempatan ini Ridwan Kamil juga menyampaikan pesan-pesan untuk berlaku tertib bagi kepada warga Bandung.

Tak hanya itu, Ridwan Kamil juga aktif memberikan pernyataan kepada wartawan. Ridwan Kamil termasuk walikota yang sangat mudah dijangkau media. Dalam berbagai kesempatan Ridwan Kamil selalu menyempatkan untuk memberikan keterangan pers. Kesempatan itu Ridwan Kamil manfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan ketertiban kepada warga Bandung baik di media elektronik seperti radio dan TV, media cetak seperti koran, dan media online.

Ridwan Kamil juga dikenal sebagai walikota yang aktif berkomunikasi melalui media sosial. Setidaknya ada tiga akun meda sosial yang kelolanya langsung, tanpa menggunakan asisten khusus. Ada facebook, twitter, dan instagram. Melalui media sosial Ridwan aktif menyampaikan ide dan gagasannya, serta program-program pembangunan kota. Juga berkomunikasi langsung kepada masyarakat tanpa ada batasan prosedural yang biasa dilakukan oleh protokoler.

“Iya (dikelola sendiri), termsuk ketika saya ngambek dikit sudah saya perhitungkan, termasuk *bebodoran* sudah saya perhitungkan. Tidak menjawab juga saya perhitungkan,” kata Ridwan Kamil.

Mengelola sendiri media sosial menurut Ridwan Kamil adalah cara yang paling aman. Menurut Ridwan Kamil, media sosial adalah hutan rimba, yang semua jenis orang ada di sana. Bisa saja orang memujinya, tapi juga bisa pada saat bersamaan orang memakinya dengan nada keras bahkan kasar.

Nah pada saat itulah butuh kematangan dalam mengelola media sosial. Ridwan Kamil tahu betul jika komunikasinya melalui media sosial akan banyak dibaca oleh masyarakat secara langsung, atau bahkan disebarluaskan oleh media massa.

Ridwan Kamil adalah sosok pejabat publik yang cukup populer di dunia media sosial. Pengikutnya di twitter sudah mencapai lebih dari satu juta orang, di instagram sekitar 600 ribu orang, dan di facebook tidak kurang dari satu juta orang yang menjadi pengikut akun facebooknya tersebut. Jadi setiap kali Ridwan Kamil menyampaikan pesan di media sosialnya, setidaknya akan ada dua juta warga yang akan membaca atau melihatnya.

“Twitter sejuta seratus, instagram alhamdulillah kemarin baru saya lihat sekitar 600 ribu, facebook satu juta, ditotal pelanggan saya lebih dari dua juta. Jadi setiap tweet itu saya pikirkan matang-matang,” kata Ridwan Kamil³

Komunikasi melalui media sosial merupakan strategi khusus yang dilakukan Ridwan Kamil selain untuk menyampaikan informasi dan membangun kesadaran warga, juga dilakukan untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang yang bersebrangan dalam politik atau pihak yang coba untuk menyeranginya.

Bahkan, Ridwan Kamil juga menyampaikan jika dirinya sering mendapatkan pemberitaan tidak berimbang dari media massa yang ada. Untuk itu menyampaikan pesan melalui media sosial dirasa cukup efektif untuk menetralkan informasi-informasi yang banyak berkembang dan menyudutkannya. Bahkan Ridwan berencana memiliki mejalah sendiri yang dijadikan media untuk menyampaikan gagasan-gagasannya.

“Sekarang saya mau bikin majalah sendiri digital, untuk mengimbangi berita-berita yang menurut saya nggak imbang,” kata Ridwan Kamil.

Media sosial memang bukan mainan baru bagi Ridwan Kamil. Sejak sebelum jadi Walikota Bandung, Ridwan Kamil juga sudah aktif berkomunikasi dan bahkan melakukan gerakan-gerakan di media sosial. Maka saat menjadi walikota kebiasaan itu tidak mau Ridwan Kamil tinggalkan. Karena menurutnya dengan menggunakan media sosial, Ridwan bisa menjangkau kalangan-kalangan muda yang sebelumnya tidak terjangkau dengan cara sosialisasi konvensional.

“Karena saya anak sosmed sebelum jadi walikota, jadi saya tau, karena orang dan saya melihat generasi saya yang umur 40 ke bawah kan generasi gadget semua. Saya tuh pengen bikin TV channel khusus RK jadi ya buat ngimbangi itu aja, jadi kalau ada tudingan tudingan,” kata Ridwan Kamil.⁴

Selain penyampaian informasi secara konsisten melalui media massa, menurut Ridwan Kamil penegakan aturan juga menjadi salah satu kunci keberhasilan. Cara yang dilakukan adalah dengan memaksa warga untuk taat aturan, sebagai salah satu upaya penyadaran dan cara membentuk sikap dan mental tertib warga Bandung.

“Ya, terpaksa (menghukum). Emang saya seneng ngehukum? Enggak. Sedih saya kalau saya sita KTP, *push up. In world looking society, your country is a world looking society*,” kata Ridwan Kamil

³ Wawancara dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Minggu 17 Mei 2015, pukul 22.00 WIB, di Pendopo Kota Bandung Jalan Dalem Kaum no 1 Bandung.

⁴ Wawancara dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Minggu 17 Mei 2015, pukul 22.00 WIB, di Pendopo Kota Bandung Jalan Dalem Kaum no 1 Bandung.

Salah satu cara membentuk kesadaran warga adalah dengan memaksanya. Memaksa untuk menaati aturan yang ada. Karena membiarkan warga melanggar, sama halnya dengan membudidayakan kesalahan pada masyarakat yang semakin lama akan menular ke individu-individu yang lain.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memaksa warganya untuk tertib dengan cara meminta pedagang kaki lima untuk tidak lagi berjualan di Jl. Kepatihan Bandung karena hal tersebut melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung no 11 Tahun 2005 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan (K3) dan memberlakukan denda kepada masyarakat yang membeli PKL di Jl. Kepatihan karena hal tersebut melanggar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.

Berbagai sanksi dan aturan tadi dikomunikasikan oleh Ridwan Kamil melalui berbagai cara, mulai dari menyampaikan pesan melalui media massa, melalui media sosial, media luar ruang seperti baligo dan spanduk, serta komunikasi langsung kepada PKL dan masyarakat di lokasi Jl. Kepatihan Bandung.

Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto menyampaikan jika penegakan hukum jadi kunci keberhasilan dalam menertibkan PKL di Jalan Kepatihan. Selama ini Yossi menilai jika penegakan hukum yang menjadi kendala utamanya. Hanya saja penegakan hukum yang dilakukan tidak selalu bersifat ekstrim, tetapi juga humanis agar tercipta suasana yang kondusif.

Dalam prosesnya juga disampaikan jika sebagai warga negara PKL memiliki tanggungjawab untuk menjaga kotanya. Meskipun sebagai warga negara ia juga mempunyai hak untuk mencari nafkah dan beraktifitas di lokasi tersebut. Maka dijelaskan lebih detail jika mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Siapa berbuat apa, itu kuncinya.

“Penegakan hukum tidak selalu ekstrim. Tapi jika disampaikan secara santun/ dialog. Siapa berbuat apa, apa yang menjadi hak dan kewajiban, ternyata enjoy juga, kata Yossi Irianto.

Pembahasan

Rendahnya kesadaran PKL terhadap aturan yang ada, serta tidak mau membayar pajak yang telah ditetapkan pemerintah, membuat Wali Kota Bandung Ridwan Kamil harus “memutar kepala” terkait dengan strategi yang diterapkannya. Beberapa proses komunikasi yang dilakukan untuk merelokasi PKL dari jalan Kepatihan ke kawasan Gedebage, ternyata belum juga membuahkan hasil yang optimal, hingga akhir tahun 2013.

Tidak hanya itu saja, sikap para pedagang kaki lima yang *pasrahisme* juga membuat Wali Kota Bandung Ridwan Kamil merasa susah untuk mengatur relokasi dari kawasan jalan Kepatihan menuju ke kawasan Gedebage. Alasan pendapatan yang menurun, membuat para PKL *ogah* berpindah tempat yang lainnya. Ketakutan untuk tidak mendapatkan pelanggan, menjadi persoalan utama akan berkurangnya pendapatan PKL tersebut. Padahal, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil telah memberikan pengertian bahwa ketakutan untuk tidak mendapatkan pelanggan itu hanya masalah klasik yang selalu dilontarkan para PKL kepada pemerintah. Padahal, secara sarana, prasarana maupun fasilitas, telah disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Dalam kasus relokasi PKL tersebut, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menggunakan strategi komunikasi politik untuk menyampaikan beberapa *win-win solution* yang ditawarkannya kepada para pedagang kaki lima. Beberapa solusi tersebut disampaikan melalui pendekatan *ngobrol* antara Wali Kota dengan para pedagang kaki lima. Sebab, akan lebih baik jika suatu pesan politik disampaikan melalui komunikasi yang santai, situasi yang santai, meski tetap memperhatikan kepentingan politik yang menyangkut isi pesan atau media penyampaian.

Dalam penelitian ini, peneliti menunjukkan nilai penting pembahasan strategi komunikasi politik yang baik oleh seorang komunikator (dalam hal ini adalah Wali Kota Bandung Ridwan Kamil) terhadap pemilihan kata dan bahasa yang disampaikan oleh komunikator, media memandang penting terkait dengan isu-isu politik di Kota Bandung yang meresahkan masalah PKL, kemudian khalayak memberikan respon yang baik terhadap isu di media yang di sampaikan serta efek dari komunikasi politik.

Di beberapa literatur disebutkan bahwa, inti komunikasi politik adalah komunikasi yang di arahkan kepada pencapaian suatu yang berpengaruh. Sehingga pada penertiban pedagang kaki lima ini, ketika Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menemukan beberapa hambatan penertiban PKL, maka Ridwan Kamil akan menggunakan sistem politik yang ada di dalam kepemimpinannya. Urgensinya dalam suatu sistem politik tak diragukan lagi, karena komunikasi politik terjadi saat keseluruhan fungsi dari sistem politik lainnya dijalankan dan di terapkan oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Masalah pesan politik terutama yang ada kaitannya dengan aktivitas persuasi, sangat berpengaruh besar terhadap penertiban pedagang kaki lima. Fokus bahasan berkaitan dengan propaganda sebagai salah satu pendekatan persuasi yang sangat populer dan banyak dilakukan oleh komunikator politik sejak dahulu hingga saat ini. Termasuk ketika Ridwan Kamil menerapkan sistem komunikasi politik melalui *sama rasa sama rata* yakni ketika Ridwan Kamil memposisikan diri sebagai bagian dari lingkup PKL. Melalui empatinya, Ridwan Kamil juga mencari solusi agar bagaimana PKL ini ketika dipindahkan masih tetap ada pembeli yang datang untuk membeli barang dagangannya.

Propaganda dalam komunikasi politik Wali Kota Bandung ternyata juga memainkan peran yang sangat penting karena merupakan satu di antara pendekatan persuasi politik selain periklanan dan retorika. Dalam praktiknya, propaganda mengkolaborasikan pesan politik guna mendapatkan pengaruh secara persuasif. Biasanya digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang terorganisir yang ingin menciptakan partisipasi aktif atau pasif dalam tindakan individu-individu masyarakat yang dipersatukan melalui manipulasi psikologis.

Sementara itu, tak dapat dipungkiri bahwa hampir seluruh pendekatan persuasi kepada khalayak di era informasi ini menempatkan media massa sebagai instrumen saluran yang mesti digunakan. Media massa mempengaruhi persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting. Dalam perspektif teori agenda setting, propaganda akan berjalan efektif, jika ada upaya pengemasan pesan dalam prioritas isi media. Isi pesan inilah yang menjadi tawaran dalam mempengaruhi cara berpikir khalayak. Prinsipnya sebenarnya "to tell what to think about" artinya membentuk persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting. Dan besarnya peran media massa itulah yang digunakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk mengajak seluruh masyarakat untuk menerapkan Perda K3.

Ridwan Kamil juga menerapkan manajemen “cinta”, seperti yang telah diungkapkannya;

“Jadi diberi pemahaman dulu. diundang. Ada fase tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota. Aada juga *kan* satgas PKL. Kita lakukan terus pendekatan secara persuasif. Semangat masyarakat Bandung itu ada gotong royong. Manajemen cinta itu *ya* semangat gotong royong. Ternyata setelah dijelaskan mereka mau. Asal ada *win-win solution*. Ada solusinya.” Kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.⁵

Dengan demikian, maka untuk menyelesaikan permasalahan PKL yang “bandel” tersebut, ternyata juga tidak bisa jika hanya mengandalkan penegakan hukum yang ekstrim saja, tetapi juga bisa melalui pendekatan hukum yang *humanis* dan ternyata lebih efektif untuk diterapkan di masyarakat.

Keberadaan aturan daerah melalui Perda, juga tidak boleh ada kompromi di setiap lapisan penegak hukum dan masyarakat. Sebab, adanya kompromi tersebut, akan melemahkan Perda sebagai aturan yang berlaku. Padahal, Perda dibuat demi kesepakatan dan penegakan aturan bersama, guna menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tentram, damai serta demi kelangsungan hidup bersama. Untuk itu adanya isu terkait dengan kompromi terhadap Perda, yang dikhawatirkan para pedagang kaki lima, bahwa adanya permainan terhadap penegakan Perda, ditepis oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil. Menurutnya, kekhawatiran tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bandung. Sehingga bagaimana upaya Pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi ketidakpercayaan masyarakat serta penilaian masyarakat terhadap birokrasi yang ada di Kota Bandung.

Berbicara soal efektifitas komunikasi politik yang dilakukan oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, rasanya perlu juga menyandingkan antara hukum komunikasi efektif dengan pelaksanaan komunikasi politik yang dilakukan oleh Ridwan Kamil. Syarat komunikasi efektif itu adalah *respect* (sikap menghargai), *empathy* (kemampuan mendengar), *audible* (dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik), *clarity* (jelas), *humble* (rendah hati).

Membangkitkan kesadaran warga kota menjadi salah satu fokus yang kini tengah coba dilakukan oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Mengingat bahwa kesadaran warga menjadi masalah terbesar yang peneliti temukan dalam penelitian ini. Cara-cara kampanye terus dilakukan. Caranya kini menggunakan hal-hal yang kreatif dengan harapan pesan dapat tersampaikan secara efektif kepada seluruh warga.

Seperti kampanye tidak membuang sampah sembarangan, Ridwan Kamil dibantu oleh mahasiswa - mahasiswa Bandung membuat kampanyenya lebih sesuai dengan segmen anak muda. Dalam baligo besar yang terpasang di Jl. Tamansari Bandung nampak foto mahasiswi cantik dengan kata-kata di sampingnya “pilih mana, bayar denda karena sampah, atau traktir aku?”

Cara ini peneliti nilai lebih menarik jika dibandingkan dengan cara-cara lama seperti tulisan “Dilarang Membuang Sampah Sembarangan” yang biasa dituliskan oleh pemerintah di baligo, spanduk, atau lokasi-lokasi penting lainnya. Meski soal efektifitas harus diukur lebih lanjut. Namun respon di masyarakat tentang kampanye ini cukup positif dan menyambut baik. Masyarakat menilai cara ini lebih “ngena” jika dibandingkan dengan cara-cara lama. Mereka

⁵ Wawancara dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Minggu 17 Mei 2015, pukul 22.00 WIB, di Pendopo Kota Bandung Jalan Dalem Kaum no 1 Bandung.

mengaku lebih mudah mengingat aturan ini yang juga banyak diduplikasi oleh masyarakat sendiri dengan memotretnya dan disebarakan melalui media sosial. Sehingga memiliki efek pesan berantai.



Gambar 1 : Baligo kampanye kebersihan yang terpasang di Jalan Tamansari Bandung

Pesan komunikasi yang lain yang disampaikan oleh Walikota Bandung adalah tentang membangun kesadaran warganya untuk ikut mencintai dan menjaga kotanya. Disampaikan pesan “Bandung Kita Tanggungjawab Kita”

Pesan tersebut selalu disampaikan dalam sambutan saat pidato, statemen saat diwawancarai wartawan, sampai dengan menuliskannya pada fasilitas-fasilitas publik seperti tempat sampah ramah lingkungan yang ada di sekitar Jalan Asia – Afrika Bandung.



Gambar 2: Pesan “Bandung Kita Tanggungjawab Kita” yang tertulis di Tempat Sampah di Jalan Asia Afrika Bandung

Sementara untuk penegakan Perda no 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL yang mengisyaratkan denda bagi pembeli di PKL, Pemerintah Kota Bandung juga memasang baligo dan spandung di berbagai sudut. Langkah ini peneliti nilai cukup efektif sebagai upaya sosialisasi namun belum maksimal.



Gambar 3: Baligo yang terpasang di samping alun-alun Bandung berisi sosialisai untuk tidak membeli barang di PKL

Berbagai cara yang dilakukan oleh Wali Kota Bandung adalah upaya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat demi terciptanya pemahaman yang sama sehingga masyarakat mau mengikuti dengan tindakan berbagai peraturan yang diciptakan oleh Pemerintah Kota Bandung baik eksekutif maupun legislatif. Karena dalam komunikasi, efektifitas itu terwujud saat komunikasi secara pemahaman, sikap, dan tindakan sudah sama sesuai dengan yang diharapkan oleh komunikator.

Daftar Pustaka

Creswell, Jhon W. 1998. *Quality Inquiry & Research Design Choosing Among Five Tradition*. London : Sage Publication.

Mulyana, Deddy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan ilmu sosial lainnya*, : Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nimmo, Dan. 2010. *Komunikasi Politik; Khalayak dan Efek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Mulyana, Deddy. 2013. *Komunikasi Politik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Meleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Wawancara

Wawancara dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Minggu 17 Mei 2015, pukul 22.00 WIB, di Pendopo Kota Bandung Jalan Dalem Kaum no 1 Bandung

Wawancara dengan Sekda Kota Bandung Yossi Irianto, Senin 1 Desember 2015, pukul 21.00 WIB, di Kantor Radio PRFM Jalan Braga no 5 Bandung.

Wawancara dengan Mantan Kepala Sat Pol PP Kota Bandung, Ferdi Ligaswara, Sabtu 18 April 2015, pukul 10.00 WIB di Kantor Dispora Jalan Aceh no 47 Bandung

Wawancara dengan Koordinator PKL Jalan Kepatihan Bandung, Muhammad Taufik